

Industri Halal sebagai Paradigma bagi *Sustainable Development Goals* di Era Revolusi Industri 4.0

Difa Ameliora Pujayanti
Program Studi Perbankan Syariah
STEI Hamfara Yogyakarta
Email : difaameliora@gmail.com

recieved: 7 Desember 2019

reviewed: 12 Desember 2019

accepted: 8 Januari 2020

Abstract

This scientific paper present insight related to halal as a global industrial paradigm and how the halal industry can play its role in the world mega project event; Sustainable Development Goals in the era of the industrial revolution 4.0 which require to be able to collaborate, adapt, competent in technology and increase connections to all layers. This topic was raised as an effort to cultivate philosophical, literary and scientific studies of halal and halal industries from global problems related to the failure to convert development to human and universal well-being. This scientific paper uses literature review in an effort to summarize relevant theories. With halal as an industrial paradigm, humans not only carry out economic activities with the motive of meeting needs and taking profits without being based on ethics, but can produce sustainable economic development that is enviromentally sound and human welfare.

keyword: *halal, halal industry, Sustainable Development Goals, industrial revolution 4.0*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk terus mempertahankan atau menaikkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat dan negara. Salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi adalah dengan tingginya produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Semakin tinggi produksinya, maka dinilai semakin bagus prospek perkembangan wilayahnya atau yang kita sebut sebagai pendapatan nasional. Setidaknya ini adalah cakupan definisi untuk menggolongkan suatu negara sebagai negara yang maju dengan menggunakan satuan GDP/PDB saat ini.

Todaro dan Smith (2004) menunjuk tiga komponen utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara mendasar dan signifikan, yakni *capital accumulation, growth in population, dan technological progress*. Ketiga komponen ini merujuk pada satu kesimpulan, yakni produksi. Orientasi dari pertumbuhan ekonomi yang asumsinya terkunci dengan pola untuk terus memproduksi, maka pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana *impact* setelahnya?

Usaha-usaha mengejar pertumbuhan selalu didorong oleh motivasi untuk investasi, produksi dan konsumsi. Hal tersebut merupakan ketidakseimbangan

dalam memandang relasi antara sumber daya alam dan manusia (Fardan, 2015). Lingkaran kegiatan ini memberikan kontribusi besar bagi menurunnya kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan menciptakan dua persoalan, yakni mengecilnya sumber daya alam dan adanya pencemaran. (Winarno, 2013). Hal ini seolah menyiratkan pada kita bahwa agar manusia sejahtera maka tak ada “kebahagiaan dua belah pihak”.

Pertanyaan semacam ini tidak hanya berfokus pada stabilitas ekonomi yang berwawasan pada kelajuan permintaan dan penawaran pasar, namun juga ditujukan pada dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh proses-proses “pertumbuhan” ekonomi terhadap ekosistem yang ada di bumi. Sebuah elegi kita dapatkan bahwa ternyata untuk memperbaiki perekonomian dunia dengan mengharapkan adanya pertumbuhan dengan produksi, justru membawa petaka tersendiri. Etika terpenting dalam produksi adalah menjaga sumber daya alam, karena sumber daya alam merupakan anugerah dari Allah dan cara kita untuk mensyukurinya salah satunya adalah dengan menjaga kelestariannya dari polusi, kerusakan dan kehancuran. (Syamsudin, 2019).

Konsep produksi dalam teori konvensional saat ini menuntut adanya peningkatan kuantitas produk, tanpa menyertakan standar prioritas kebutuhan masyarakat dan menjaga elektabilitas nilai dan etika spiritual (ruh) dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak ada satuan perintah baku proses produksi yang terjamin apalagi mengindahkan jaminan kehalalan pada seluruh rantai produksinya. Sedangkan pada konsep ekosistem halal, parameter halal haram dijadikan sebagai panduan atau dasar filosofis, kemudian

thayyib sebagai dasar teknisnya yakni memberikan jaminan kebersihan, keamanan dan kualitas produk.

Pada tahun 2000, *MDGs* resmi diberlakukan dengan memfokuskan pada delapan tujuan pembangunan milenium. Upaya ini dalam rangka menanggapi tantangan untuk menyejahterakan dan memajukan masyarakat dunia. Proyek ini ditargetkan berjalan hingga tahun 2015. Mendapat banyak kritikan di masa pensiunnya *MDGs*, disusunlah sebuah inisiasi yang sama dengan menyempurnakan target-target yang dianggap lebih relevan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan skala global, yakni *SDGs (Sustainable Development Goals)*. Tersusun dalam 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan dan 169 target, *SDGs* dicanangkan akan diberlakukan hingga 2030 mendatang.

Masuk dalam era yang sama, lahir sebuah isu dunia baru; industri halal. Industri halal merupakan sebuah kegiatan dalam memproses barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariah (*islamic law*). Seiring dengan masifnya sektor perindustrian dunia di masa Revolusi Industri 4.0 ini, industri halal hadir menjawab kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Industri halal tidak sekedar bersinonimkan dengan barang, namun juga *lifestyle*.

Pasar halal global telah berkembang menjadi sektor pertumbuhan ekonomi dunia yang baru dan menjadi perhatian di negara-negara maju dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi sektor baru ini meniscayakan juga adanya suatu kriteria khas yang membedakannya dengan sistem konvensional, yakni halal dan haram. Kriteria halal haram disebut dalam Qur'an

dan hadits sebagai landasan utama dalam melaksanakan sistem kehidupan umat Islam.

Dalam proses manajemen halal yang diusung oleh Kementerian BPPN dalam publikasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, melalui konsep *halal by design* yang berasaskan pada syariat Islam mengenai produksi barang dan pengolahannya yakni *halal* dan *thoyyib*, dapat menjadi sebuah paradigma baru dalam sektor perindustrian dunia. Dengan memperhatikan pada dua asas ini (red: *halal* dan *thoyyib*), diharapkan mampu memberikan konsep pertumbuhan ekonomi yang juga memiliki tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti hendak memberikan sebuah preferensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dunia yakni dari perspektif halal bagi seluruh tatanan industri ekonomi global serta peranan industri halal yang sudah berjalan saat ini. Preferensi yang diberikan berupa edukasi filosofis memaknai halal sebagai paradigma bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini dipandang penting disebabkan berangkat dari pemahaman bahwa halal bukan hanya prinsip personal atau hanya berada dalam skop masyarakat kecil saja, khususnya umat Islam, tetapi juga dapat diterapkan bagi masyarakat umum yang sifatnya universal. Selain itu, karya tulis ini dibuat sebagai hasil pengamatan peneliti terhadap praktik ekonomi yang terjadi di lapangan, terutama dalam perindustrian di tengah tren isu industri halal dan dilaksanakannya proyek internasional *Sustainable Development Goals*. Dalam sub rekomendasi, peneliti menggunakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berpusat di Negeri Jiran, Malaysia dan "Dapur Halal Dunia", Thailand.

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis memiliki tujuan menyadarkan pentingnya halal sebagai standar hidup, memberikan preferensi baru terkait halal sebagai paradigma baru pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peran industri halal terhadap berjalannya *Sustainable Development Goals*.

Kajian ini terbagi menjadi empat bagian; (1) pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, objek penelitian dan rumusan masalah, (2) kajian literatur, yang mendeskripsikan teori dari variabel penelitian, (3) hasil penelitian, yang berisikan hasil pengkajian teori dan pengkajian fakta di lapangan, (4) kesimpulan dan saran penelitian lanjutan bagi pengembangan kajian.

KAJIAN LITERATUR

Memahami Parameter Halal dan Haram

Halal memiliki arti segala yang dibolehkan oleh syariat Islam, sedangkan haram adalah sebaliknya yakni yang tidak diizinkan oleh syariat Islam (Purnomo, 2016). Kriteria halal terkait dengan asal, sifat dan metode mengolah makanan (Fouad Ali et al, 2019). Pada umumnya, bahkan dari masyarakat muslim sendiri memaknai bahwa halal haram dekat pengertiannya dengan konteks dalam memproduksi makanan. Padahal, konsep halal haram merupakan bagian kehidupan sehari-hari umat islam. Untuk itu diperlukan adanya pendalaman literasi halal haram.

Literasi Halal didefinisikan oleh Salehudin (2010) dalam Purnomo (2016) sebagai kemampuan untuk membedakan barang dan jasa halal dan haram berdasarkan Syariah (Hukum Islam). Literasi Halal penting karena sebelum konsumen siap untuk mengonsumsi produk atau menggunakan layanan, mereka akan

melalui proses pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi terlebih dahulu.

Selain konsumen menyadari atau memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait halal haram, kesadaran ini harus juga dimiliki oleh semua pihak seperti perusahaan, biro distribusi, komunitas, kelembagaan dan lain-lain.

Industri Halal

Industri halal merupakan sekelompok perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dengan mengolah bahan baku, baik barang ataupun jasa yang input, proses dan output-nya berpedoman pada syariat Islam. Halal kini menjadi indikator primadona yang bersifat universal sebagai jaminan kualitas suatu produk dan standar hidup (Gillani et al, 2016). Bersifat universal karena halal dapat diadopsi oleh siapa saja, bukan hanya muslim melainkan juga dari kalangan non muslim.

Industri halal berkembang dengan merambah pada sektor makanan dan minuman, keuangan, *travel*, mode busana (fashion), kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, *healthcare* dan pendidikan. Upaya dalam melesatkan potensi dan memanfaatkan peluang industri halal, diperlukan sinergitas yang baik antara semua elemen. Hal ini dilakukan demi mencapai standar halal secara holistik (Faqiatul et al, 2018).

Sinergitas untuk membentuk sebuah ekosistem halal dalam industri halal, selain sumber daya berupa manusia, bahan baku atau alatnya, diperlukan *support system* sebagai pengawas dan *guidelines* berjalannya kegiatan ekonomi halal di industri halal.

Millenium Development Goals

MDG's dicanangkan sebagai wujud komitmen 189 negara di dunia dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka menuntaskan isu-isu pemenuhan hak asasi dan kebebasan. MDG's dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi di tahun 2000 dan dihadiri oleh anggota PBB bertempat di New York. Dasar hukum deklarasi MDG's adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000. (<https://www.un.org/millenniumgoals/>)

MDG's berisikan 8 butir tujuan pembangunan yang ditargetkan di era milenium yakni mengurangi separuh orang-orang yang menderita karena kelaparan, penjaminan penyelesaian pendidikan dasar, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi 2/3 kematian anak dan menjamin keterjangkauan akses air bersih. Tujuan ini ditargetkan hingga tahun 2015.

Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah program yang mengintegrasikan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kemaslahatan manusia dan keberlangsungan bumi. SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan penerus dari MDGs (*Millenial Development Goals*) yang memiliki filosofi yang sama yakni menanggapi tantangan pembangunan dalam skala global. Namun MDGs belum berhasil diimplementasikan sejak konsepnya pertama kali dipublikasikan secara terbuka pada 1987. Kegagalan ini, menurut Noorbakhsh dan Ranjan (1999) disebabkan karena adanya kesulitan dalam penerapan praktis yang dialami oleh berbagai negara dalam mengintegrasikan tiga dimensi

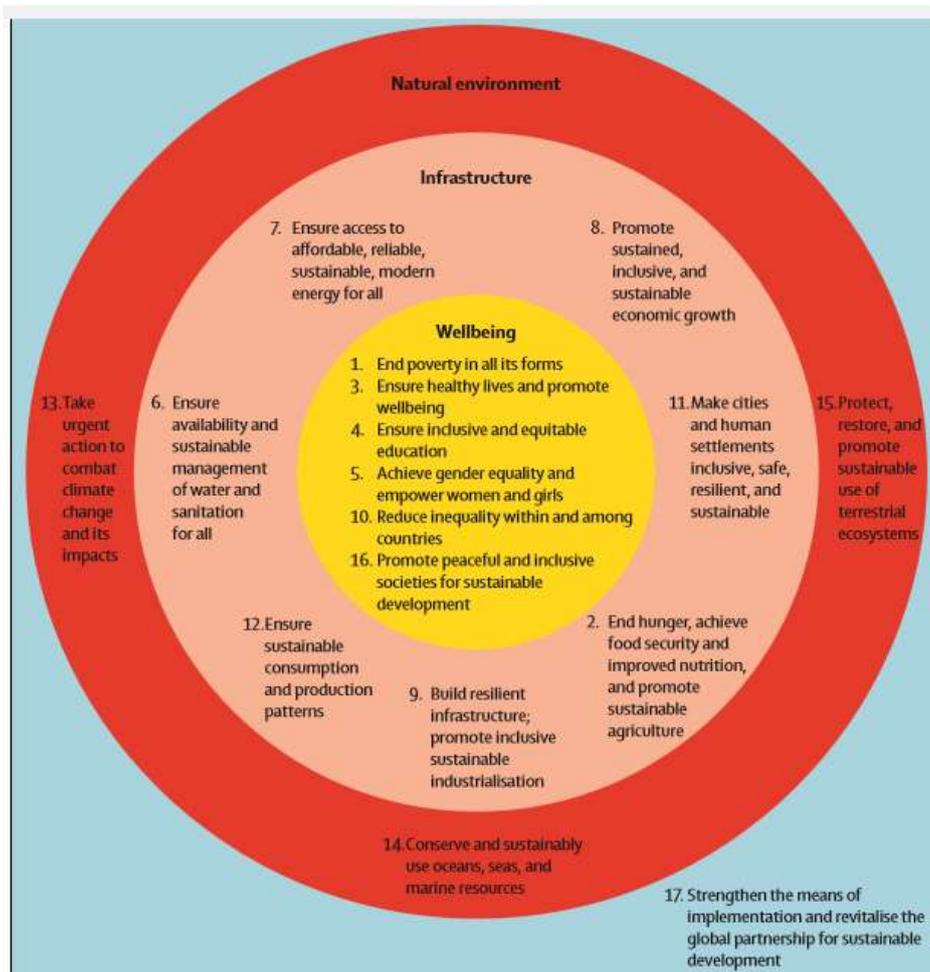
tersebut dan menempatkannya ke dalam operasi *real*.

Cendekiawan seperti Hajer in Robert (1997), Redclift in Briassoulis (2001), Counsell (1999), Holden (2008), dan Astrom (2011) menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah program berkelanjutan diperlukan perubahan yang fundamental dari segi ideologi, perubahan budaya dan kebiasaan, bergantinya paradigma, reformasi institusi yang didukung oleh struktur politik dan kelembagaan yang tepat (Atih Rohaeti et al, 2015).

Terdapat tujuhbelas target pembangunan berkelanjutan yang terbagi pada tiga lapisan konsentris, diantaranya adalah lapisan pertama yang merupakan bagian dalam yang bersangkutan langsung dengan individu yakni target distribusi merata di bidang kesehatan dan pendidikan.

Lapisan kedua merupakan lapisan yang memiliki tujuan kesejahteraan lingkup masyarakat, yakni terkait dengan produksi, distribusi, pelayanan pengiriman barang dan jasa termasuk diantaranya adalah makanan, energi, kebutuhan air bersih, pengolahan limbah dan sanitasi di kota-kota dan pemukiman penduduk.

Lapisan ketiga mencakup lingkungan alami yang berkaitan dengan peran pemerintahan dalam sumber daya alam, kepemilikan umum di daratan, lautan, dan udara, termasuk diantaranya adalah keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Di lapisan ketiga ini kegiatan manusia tidak berdampak langsung terhadap perubahan lingkungan secara umum, namun aktifitas manusia tetap dapat memberikan pengaruh.



Gambar 1. Grafik lapisan konsentris SDGs

Revolusi Industri 4.0

Klaus Schwab –seorang teknisi dan ekonom Jerman sekaligus pendiri dan ketua dari *World Economic Forum* dalam bukunya yang berjudul “*Fourth Industrial Revolution*”, mengatakan bahwa “*the fourth industrial revolution will affect the very essence of our human experience*”. Revolusi Industri 4.0 atau yang biasa kita sebut juga sebagai *Disruption Era* mengubah cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan cara yang sangat dramatis dan kecepatan yang eksponensial dibandingkan revolusi industri di seri-seri sebelumnya.

Industri 4.0 membawa sebuah keniscayaan akan kecepatan, keluasan dan kedalaman terutama dalam informasi dan inovasi yang tentunya akan berdampak sistemik pada negara-negara dunia. *Megatrend* yang terjadi terlihat dari adanya perubahan secara fisik, seperti kendaraan tanpa pengemudi, *advanced robotics*, *artificial intelligence*, dan digitalisasi.

Disrupsi ini turut berdampak pada bidang ekonomi. Aktivitas ekonomi yang terkena pengaruh digital ini melahirkan bentuk atau model baru seperti *collaborative economy*, *gig economy*, dan *sharing economy*. Lahirlah sebuah istilah baru : ekonomi digital. Ekonomi digital ini berdampak pada munculnya jenis pekerjaan baru, sifat pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi.

Menghadapi sebuah *circumstance* yang menggunakan pendekatan baru –dunia fisik, digital, dan biologis ini, setiap individu, masyarakat dan terutama negara harus merespon perubahan yang serba cepat ini dengan komprehensif dan terintegrasi.

HASIL PENELITIAN

Industri halal dapat berkontribusi secara langsung mewujudkan tiga dimensi *SDGs* yang berbasis teknologi; ekonomi, sosial dan lingkungan. Mimpi indah ini diprakarsai dengan kerangka strategis yang melibatkan sokongan masyarakat internasional, domestik, disertai dengan tiga pilar yakni komitmen pemerintah, kapabilitas produksi, dan ekosistem pendukung operasional (*Indonesia Halal Report and Strategy 2018*).

a. Ekonomi

Peluang industri halal dari masyarakat internasional tercatat dalam sebuah laporan *State of The Global Islamic Economy* tahun 2018 bahwa masyarakat muslim dunia mengonsumsi sekitar US\$2,1 triliun pada tahun 2017. Laporan STGIE ini juga mengestimasi bahwa di sektor keuangan syariah terdapat US\$2,4 triliun dari total aset. Sektor makanan dan minuman yang dibelanjakan sebesar US\$1,3 triliun, sektor kebutuhan pakaian US\$270 miliar, media dan hiburan US\$209 miliar, perjalanan wisata US\$177 miliar, dan membelanjakan untuk obat-obatan dan kosmetik masing-masing sebesar US\$87 miliar dan US\$61 miliar.

Indonesia menyumbang angka sebesar 10% dari total pendapatan ekonomi halal global sebesar US\$1.2 miliar di tahun 2017. Angka ini terbilang besar bukan hanya ketika membandingkannya dengan total prosentase global, namun ketika dibandingkan dengan total produksi atau ekspor Indonesia yang berada di angka 3,8% saja. Dari gambar di bawah ini, kita mendapat informasi bahwa industri halal Indonesia mendapat banjir peluang ekspor ekonomi halal dari OIC hingga sebesar US\$17,8 miliar.



Gambar 2. Peluang Ekspor Ekonomi Halal

Industri halal Indonesia menyumbang 3,8 miliar dolar AS per tahunnya, ini setara dengan 0,4% GDP Indonesia. Secara kasat mata, dengan pencapaian tersebut seharusnya sudah mampu menggeser nilai impor Indonesia dan melesatkan nilai ekspor. Sebaran kesempatan kerja dari berkembangnya komoditas dan meluasnya pasar baru diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk menaikkan daya kompetisi para pelaku bisnis di era Revolusi Industri 4.0 ini, Indonesia wajib untuk mengadopsi strategi digital dari berbagai lini terutama menciptakan platform ekonomi digital yang mampu menjangkau UMKM, *halal supply chain*, serta capaian kapabilitas produksi halal nasional yang mampu mencakup pada skala global.

Kementerian BPPN dalam publikasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 mencatat empat hal dalam rangka membangun strategi digital ekonomi halal ; 1) *Halal market place* dan sistem pembiayaan syariah; 2) Pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan *start up* yang

dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan memiliki cakupan global; 3) Sistem informasi yang terintegrasi untuk *traceability* produk halal.

b. Sosial

Konsekuensi penerapan industri halal yang tak sekedar sebagai pemberi jaminan dari standar halal suatu barang, tetapi juga menciptakan wawasan *halal by design* dalam kehidupan masyarakat. Pelaku bisnis harus melewati tahapan pengujian untuk bisa mengkategorikan barang/jasanya memiliki klasifikasi halal oleh birokrat yang terkait sehingga mampu turut meramaikan pasar global industri halal, yang dalam hal ini adalah BPJH.

Dalam serangkaian proses pengujian tersebut, terdapat adanya sosialisasi dan literasi terkait halal kepada para pelaku bisnis. Hal ini menjadi langkah struktural yang dilakukan negara untuk mencerdaskan rakyatnya melalui pendidikan semi-formal dengan formasi pendidikan yang berorientasi pada sosio-ekonomi. Tak hanya sosialisasi, terdapat pula pelatihan-pelatihan dengan tutor yang kompeten dalam bidang bisnis dan digital,

pendampingan secara berkala, dan kemudahan pelayanan permodalan dan pembiayaan.

c. Lingkungan

Indonesia memiliki nilai lebih yang dapat menguatkan korelasi perlindungan kelestarian lingkungan yang tercantum dalam *SDGs* dan pengembangan industri halal di klaster pariwisata. *Local wisdom* atau kearifan lokal dalam menjaga sumber daya alam yang dianut masyarakat tersebar di hampir seluruh wilayah nusantara. Keeratan psikologis bahwa ‘tak boleh sembarang bertindak terhadap alam’ masih menjadi kunci dari terjaganya beberapa wilayah asri Indonesia.

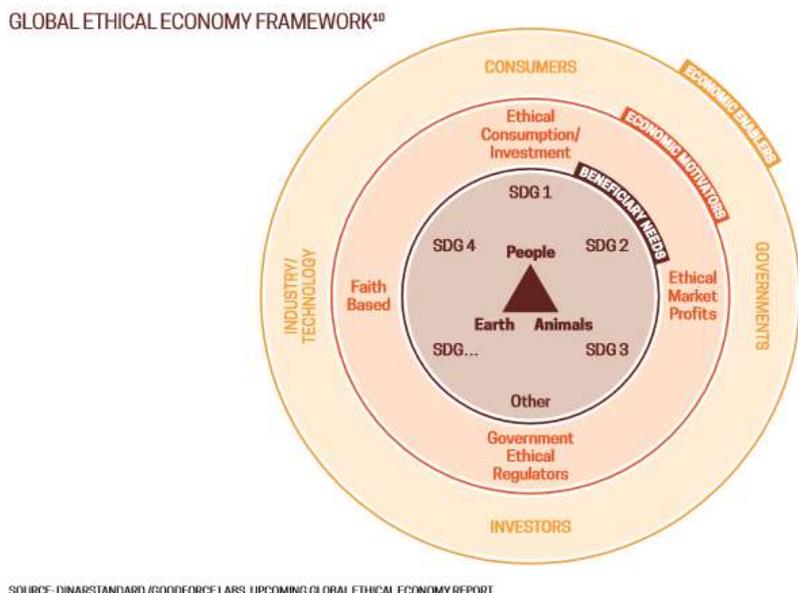
Dengan ditetapkannya 10 wilayah Indonesia sebagai sentra pariwisata halal, kearifan lokal diharapkan dapat menjadi pengikat untuk menjaga kelestarian alam. Tentunya tak sekedar diikat oleh keyakinan “nenek moyang”, namun juga melalui proses internalisasi nilai islam kepada masyarakat

secara integral bahwa alam merupakan makhluk Tuhan yang juga memiliki hak untuk sama-sama dijaga.

Konsep *halal supply chain* yang memonitori pengolahan barang dan jasa, turut memerhatikan pula batasan ‘eksploitasi’ sumber daya alam. Termasuk di dalamnya adalah keberlangsungan ekosistem dengan standar nilai Islam untuk tidak berlebihan dalam memproduksi dan mengonsumsi.

d. Support System Industri Halal sebagai Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Industri halal merupakan bagian dari ekonomi Islam, artinya pengembangan industri halal akan memiliki pengaruh pada perekonomian Islam. *The State of Global Islamic Economy Report 2018/19* menyusun dalam sebuah kerangka ekonomi etika global yang dapat mendorong peran ekonomi Islam pada tingkat global.



Gambar 3. Kerangka Ekonomi Etika Global (GIEI Report 18/19)

Hal pertama yang patut kita sadari bersama bahwa dampak etis utama dari dilaksanakannya setiap konsensus muama-

lah manusia –salah satunya ekonomi, secara langsung berdampak pada manusia serta ekosistem planet ini. Untuk itu ekonomi

harus menciptakan kesejahteraan dan keberlanjutan dengan berbasis lingkungan sebagai bentuk amanah terhadap Pencipta Alam, seperti yang terucap dalam kalam Ilahi QS. Al-A'raf : 85, *"..dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman."*

Komponen dari terlaksananya ekonomi yang berkah dilaksanakan oleh pelaksana (motivator) ekonomi, yakni pemerintah sebagai pionir, regulator dan fasilitator beserta regulasinya, kemudian lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana teknis. Lalu konsumen, industri dan investor sebagai partisipan ekonomi.

Kehadiran industri halal dalam perekonomian global turut serta berpartisipasi pada perhelatan megaprojek *Sustainable Development Goals*. Industri halal sebagai bagian dari ekonomi Islam dapat berperan dalam tujuan (1) *no poverty*; (2) *zero hunger*; (3) *good health and well being*; (4) *quality education*; (5) *gender equality*; (7) *affordable and clean energy*; (8) *decent work and economic growth*; (9) *industry, innovation and infrastructure*; (10) *reduced inequalities*; (12) *responsible consumption and production*; (13) *climate action*; (14) *life below water*; dan (15) *life on land*.

Sumber daya manusia mengacu pada proses yang berhubungan dengan pelatihan, pendidikan dan inisiasi program profesional lainnya dalam rangka meningkatkan tingkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, kemampuan, nilai dan fungsi sosial (Marimuthu et al, 2009).

Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sumber daya manusia sebagai komponen kunci industri halal, maka diperlukan program pemberdayaan optimal

dan maksimal. Program pelatihan yang optimal dan maksimal memainkan peran yang signifikan terhadap peningkatan tingkat pemahaman halal dan industri halal mulai dari hulu ke hilir. Pelatihan yang tepat akan memastikan bahwa ada kesinambungan antara pengetahuan dan keterampilan diantara para pemain industri (Suzana, Che Wan, 2017).

Penyedia layanan logistik harus memastikan staf dan karyawan terlatih dan mengetahui tren dan persyaratan halal. Diperlukan sebuah strategi dalam membangun dan memberdayakan sumber daya manusia dalam industri halal. Penulis mengutip sistem regulasi yang berada di Malaysia yang tertuang dalam penelitian Sariwati et al (2016) untuk dijadikan sebagai saran rekomendasi. Rekomendasi tersebut tertuang dalam sebelas strategi, sebagai berikut :

1. *Human Capital Policy*. Perencanaan sistematis untuk pelatihan dan pengembangan manusia membutuhkan kebijakan dari manajemen puncak, dibersamai dengan komitmen dan dukungan yang penuh untuk pengembangan sumber daya manusianya dan menetapkan arah sumber daya manusia bersama dengan visi organisasi dan strategi bisnis.
2. *Human Capital Training Model*. Menurut Abdullah (1992) juga dikemukakan oleh Shariff (2015), model pengembangan sumber daya manusia diintegrasikan dengan kebutuhan *human resources* yang sesuai dengan rencana dan pertumbuhan bisnis, inovasi teknologi dan rencana pengembangan staf dengan paket insentif.
3. *Training Needs Analysis*. Adanya pelatihan harus memberikan makna esensial dan peningkatan produktivitas kerja serta inovasi. Kita patut belajar

dari sistem manajemen halal toyyib Department of Standard Malaysia yang melakukan TNA (*Training Needs Analysis*) ini dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan, menilai kinerja karyawan, mendapatkan dukungan manajemen bagi biaya pelatihan, mengevaluasi dan menentukan *cost-benefit training*, merancang konten pelatihan dan menyediakan konsultan pelatihan.

4. *Training For New Knowledge, Shariah And Islamic Principles*. Menurut Alina et al (2015) yang dipaparkan dalam karya ilmiah Sariwati tersebut, "*scientist and industry professionals need to take Fiqh courses to understand the tools, principles and sources of knowledge that Islamic scholars use to derive rulings.*"
5. *Development Of Halal Skills*. Terlepas dari kemampuan kognitif, keterampilan kerja dan kompetensi (operasional dan psikomotor) dan memberikan pengalaman kerja dalam melaksanakan pekerjaan dan sistem kerja sangat penting dalam bisnis halal dan operasi halal untuk memungkinkan mendapat hasil yang lebih tinggi, produktivitas dan kualitas, laba, daya saing dan pertumbuhan bisnis dengan bekerja yang efektif.
6. *Instilling Of Halal Work Values*. Nilai-nilai hasil pelatihan yang diharapkan ada dalam setiap sumber daya manusia adalah etika kerja, rasa hormat dan ketulusan, setia dan menjunjung tinggi keyakinan beragama yang baik. Sedangkan nilai-nilai Islam, pengetahuan dan kepatuhan tidak masalah apabila juga ikut diinternalisasikan kepada non-muslim.
7. *Halal Training Providers*. Penyedia pelayanan pelatihan merancang modul

pelatihan unik yang berdasarkan pada pengalaman dan keahlian kerja di bidang halal.

8. *Halal Training Programs*. Poin ini meliputi pelatihan seperti apa yang efektif, diantaranya : 1) dapat mendefinisikan objek dari pelatihan, 2) memenuhi persyaratan TNA, 3) desain silabus pelatihan yang sesuai tujuan pelatihan, 4) sistem evaluasi untuk mengukur pembelajaran, 5) mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan, 6) melibatkan tutor yang berkualitas dan berkompeten.
9. *Entrepreneurship In Halal*. Dari karya ilmiah yang ditulis sebelumnya oleh Shariff (2015) menyatakan bahwa Malaysia bukan hanya menghasilkan mutu yang bagus dan bersaing, Negeri Jiran ini juga banyak menghasilkan *self-employed entrepreneur* yang dapat mencetak lapangan pekerjaan dan menghasilkan ekonomi terbarukan; halal.
10. *Training Evaluation*. Pelaksanaan evaluasi harus terus dilakukan, hal ini sebagai bagian dari pengendalian strategi agar proses dan hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
11. *Collaboration With Halal Agencies*. Dengan adanya kolaborasi bersama lembaga terkait, maka akan ada implementasi halal di tempat kerja yang sebenarnya dengan menjadikan konsep halal sebagai budaya organisasi/perusahaan, transfer pengetahuan, dan dengan pelatihan yang diikuti juga disertai dengan sertifikat halal yang dapat memudahkan pemain baru dalam dunia industri halal.

e. Halal Chain

Rantai halal diartikan sebagai seluruh kegiatan produksi yang terjamin kehalalannya. Hal ini meniscayakan hadirnya suatu badan yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan, pengawasan, pengujian hingga berwenang dalam mengambil kebijakan dan pengevaluasian produksi, distribusi dan konsumsi.

Contoh yang bisa kita ambil adalah negeri “Dapur Halal Dunia” yang menjadi julukan yang disematkan dan telah menjadi branding bagi Thailand. Dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Guangli et al (2016) telah memberikan gambaran *halal logistics* dan *supply chain linkage* Thailand.

Dengan populasi muslim yang minoritas disana, pemerintah Thailand tidak lantas menjadikan adanya industri halal dengan segmentasi warga muslim atau turis muslim saja, melainkan tersedia pula untuk segmentasi non-muslim. Pemerintah Thailand hendak ‘mendobrak’ *labelling* bahwa sesuatu yang berlabel ‘halal’ atau ‘islam’ hanya untuk muslim dalam industrinya, contohnya dari makanan dan minuman. Karena pada dasarnya makanan yang halal dan telah lulus uji verifikasi sebagai makanan yang sehat, dan ini yang hendak disosialisasikan bahwa produksi yang melalui cara Islam selain memberikan jaminan kualifikasi agama (halal) namun juga *thayyib* yang baik dan sehat. “*In addition halal products must comply with GMP and HACCP standards and be produced and cared for under the principles of thayyib.*”

Rininta (2017) menyebutkan dalam karya ilmiahnya, Thailand telah memimpin sebagai lima besar *halal food exporter* di pasar dunia. Thailand juga diketahui sebagai negara dengan dukungan investor dan pemerintah yang kuat serta HSIT (Halal Standard Institute of Thailand) sebagai badan yang memiliki otoritas terhadap

pengelolaan industri halal disana, CICOT (The Central Islamic Committee of Thailand) sebagai badan serifikasi dan HSC (Halal Science Center) yang merupakan sebuah fakultas khusus sebagai bagian R&D di Universitas Chulalongkorn, sumber daya agrikultural yang kaya, sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur yang matang. Pemerintah juga memusatkan wilayah khusus untuk peningkatan, perluasan dan pengayaan ekspor makanan halal dengan menjadikan provinsi di selatan Thailand seperti Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla serta resor pantai Phuket sebagai basis produksi utama produk halal di Thailand. (Abdul, 2014)

Strategi Thailand untuk menangkap pasar halal global seperti : (1) tanggap dalam melihat peluang. Pemerintah Thailand berhasil mengidentifikasi pasar dan mencerminkan potensi pertumbuhan yang pesat seperti dari data yang terlihat pada 2009 ekspor Thailand melonjak hingga angka THB 8,36 miliar dari yang sebelumnya pada tahun 2007 sebesar THB 3,38 miliar, (2) mempromosikan *halal food* Thailand dengan membuat agensi khusus untuk mengkoordinasi orientasi ekspor dan akreditasi dibawah National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS), sedangkan untuk tingkat internasionalnya disesuaikan dengan *halal food standard of United Arab Emirates*. Sistem ini dibentuk untuk mengedukasi, meningkatkan dan mendorong para pemain pelaku usaha industri halal agar produknya bisa diakui secara internasional, (3) mengadakan agenda untuk mensupport program *halal food* Thailand SMEs seperti HSIT, CICOT yang berkolaborasi dengan *Office of Tourism Development (OTD)* untuk mengadakan seminar yang bertajuk “Developing Halal Food Service for

Tourism”, kemudian HSIT, CICOT, Department of Export Promotion (DEP) dari Ministry of Commerce (MOC) dan HSC dari Universitas Chulalongkorn yang mengadakan THAIFEX dengan slogan “One Country One Logo”, pameran “Food of Thailand”, “Design in Thailand”, “Halal” yang diselenggarakan oleh HSIT dan masih banyak seminar lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Permasalahan dunia yang ada saat ini menggambarkan benturan antara kepentingan manusia dan pelestarian lingkungan. Tetapi suatu masalah ada bukan untuk tidak diselesaikan. Sejatinya manusia diberi akal untuk mampu mengelola sumber daya sebagai pengendali bumi. *SDGs* hadir sebagai salah satu dari sekian upaya untuk memberangkatkan manusia menuju kesejahteraan umat dengan tanpa menzolimi.

Konsep nilai islam yang menjadi aspek fundamental dalam industri halal; halal dan *thoyyib* bukan saja diasosiasikan dengan produk dan jasa, melainkan juga dalam bentuk sebuah paradigma baru gaya hidup manusia. *SDGs* dan industri halal memiliki filosofi pembentukan yang sama –terutama dalam bidang ekonomi, yakni usaha membawa kesejahteraan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan dan menjaga potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam, pun manusia. Kecakapan ide dari keduanya dapat disatukan dengan *SDGs* sebagai wadah dan industri halal sebagai paradigma global yang menyentuh dan berperan pada tiga dimensi dari target *SDGs*, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebagai bentuk adaptasi dari kemajuan zaman, industri halal kemudian memformasikannya sebagai aktifitas

industri yang mengaplikasikan teknologi berbasis ramah lingkungan berdasarkan syariat islam. Industri halal sebagai sebuah fenomena baru perekonomian dunia patut dijadikan paradigma baru terutama dalam praktik produksi dan konsumsi dunia.

Sebagai negara yang disorot akan bonus demografi, muslim sebagai dominan populasi, dan prosentase belanja industri halal yang tinggi, Indonesia sudah sepatutnya bertransformasi menjadi negara besar sentra industri halal dunia. Terlebih bagi, kebaruan untuk berani mengambil langkah menjadi sentra industri halal dunia diperlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak. Melayakkan sumber daya manusia sebagai pemberdayanya, melestarikan sumber daya alam sebagai pemelihara, dan teknologi sebagai infrastruktur yang tidak dipisahkan dari masyarakat. Yang tidak kalah penting dan vital adalah bagaimana peran pemerintah serta lembaga pelaksana di bawahnya dalam melakukan pengendalian manajemen secara berkala dan produktif sehingga industri halal bisa terus hidup dan berkembang.

Pekerjaan rumah selanjutnya untuk Indonesia sebagai negeri muslim terbesar dunia adalah bagaimana kecerdasan dan kepekaan pada seluruh lini untuk bisa menangkap kemudian mengeksekusi secara tepat dan cermat peluang luar biasa yang dimiliki Indonesia. Hambatan yang masih ada saat ini adalah peran pemerintah dan seluruh jaringannya yang belum terintegrasi serta kekuatan regulasi yang belum matang. Hal ini wajib untuk segera diselesaikan, sehingga Indonesia mampu memproduksi diri bukan sebagai konsumen, melainkan sebagai produsen aktif dan menjadi pihak yang persuasif dalam membumikan ekonomi islam, terkhusus industri halal di kancah global.

Untuk menyempurnakan dan memperkaya khazanah riset dan pengembangan industri halal diperlukan adanya penelitian lanjutan terkait peran industri halal dalam program *Sustainable Development Goals* baik di skala nasional maupun global, termasuk diantaranya adalah halal sebagai paradigma ekonomi global dan bagaimana perekonomian halal dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik dan *sustain*.

Daftar Pustaka

- Alina, A.R., A.N. Rafida, H.K.M.W. Syamsul, A.S. Mashitoh and M.H.M. Yusop. (2013) The Academia's Multidisciplinary Approaches in Providing Education, Scientific Training and Services to the Malaysian Halal Industry. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13 (Approaches of Halal and Thoyyib for Society, Wellness and Health) : 79-84.
- Budi Winarno. 2013. *Etika Pembangunan*. Jakarta : Caps Publishing.
- Farhad Noorbakhsh and Sanjeev Ranjan. A Model for Sustainable Development : Integrating Enviromental Impact Assessment and Project Planning. *Impact Assessment and Project Appraisal*, Volume 17, Number 04, December 1999, pages 283-293, Beech Tree Publishing, 10 Watford Close, Guildford, Surrey GU1 2EP, UK.
- Faqiatul Mariya Waharini, Anissa Hakim Purwantini. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Jurnal Muqtasid IAIN Salatiga*, 9 (1): 1-12.
- Fouad Ali Abdullah, Gabriela Borilova and Iva Steinhäuserova. (2019). Halal Criteria Versus Conventional Slaughter Technology. *Animals*, 9, 530.
- Gillani, S. H., Ijaz, F., and Khan, M. M. (2016). Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1), 29-49
- Guangli Zhan, Pairat Watcharapun, Chutima Wangbenmad and Jedsarid Sangkapan. Halal Logistics and Supply Chain Linkage Potential Across the Thai-Malaysia Border as a Driver of IMT-GT Economic Development. *The 7th Hatyai National and International Conference*. June 32, 2016 at Hatyai University.
- Indonesia Halal Report and Strategy 2018.
- Maran Marimuthu, Lawrence Arokiasamy and Ismail. (2009). Human Capital Development and Its Impact on Firm Performance : Evidence From Developmental Economics. *Journal of International Social Research*, 2 (8).
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
- Muhammad Fardan Ngoyo. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Jurnal Sosioreligius* Volume I No. 1 Juni.
- Mohani Abdul. (2014). Perceptions on Halal Food Certification in Hat Yai, Thailand. *International Journal of Economics and Management* 8 (1) : 178-194.
- Purnomo M. Antara et al. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance* 37 196
- Rininta Nurrachmi. (2017) The Global Development of Halal Food Industry :

A Survey. *Tazkia Islamic Finance and Business Review* Volume 11 (1), 39-56.

Sariwati Mohd Shariff, Sabariah Mohamad, Hanini Ilyana Che Hashim. (2016). Human Capital Development in Halal Logistics : Halal Professionals or Halal Competent Persons. *Journal of Applied Enviromental and Biological Sciences*, 6 (8S) 1-9.

Syamsudin Mochtar. (2019). Studi Komparasi Pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 04 Nomor 2, 274-288.

Suzana Ariff Azizan, Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi. Halal Industry in Malaysia : Enhancing Human Resource Capability. _____

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Jakarta : Erlangga.

The State of Global Islamic Economy Indicator Report 2018/2019

The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020

<https://www.un.org/millenniumgoals/>